



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)

UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FAJAR FATAHILLAH

2. Jabatan : **KEPALA**

3. NHK : 918073

II. DATA HARTA

A.	TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	850.000.000
A. 17	ANAIT DAN BANGONAN	Np.	030.000.00

 Tanah dan Bangunan Seluas 396 m2/156 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 175.000.000

MOTOR, PIAGIO VESPA SPRNT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

35.000.000

 MOBIL, HONDA HONDA MOBILIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	M	M	Rp.	21.500.000
D. SURAT BERHARGA			Rp.	
E. KAS DAN SETARA KAS	KPK	KPK	Rp.	14.700.000
F. HARTA LAINNYA			Rp.	
Sub Total	WW.	WW.	Rp.	1.061.200.000
II. HUTANG			Rp.	60.000.000
V. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)			Rp.	1.001.200.000

Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan





Nepotisme.

Komisi Pemberantasan Korupsi

